



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar

Triwulan II Tahun **2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

0811 4484 445

@bpspl_makassar



bpsplmakassar

BPSPL Makassar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

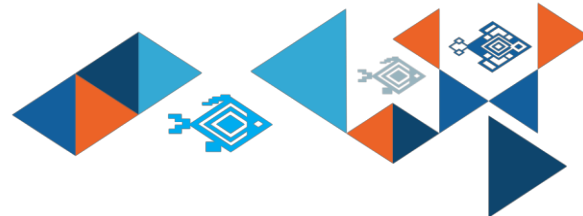
Maros, 14 Juli 2025

**Plt Kepala Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut
Makassar**



Ditandatangani
Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik Triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja (LKj) Triwulan II tahun 2025 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2025. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Triwulan II tahun 2025 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan II Tahun 2025 terdiri atas empat Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Triwulan II Tahun 2025 adalah **110,66** dengan predikat kinerja **"Istimewa"**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKM 8) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar telah melampaui target dengan capaian 109% / realisasi 92,51 dari target 85.

(IKM 10) Laporan SPIP yang disusun di lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100% / realisasi satu (1) target yang disusun setiap Triwulan.

(IKM 11) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan capaian 116% / realisasi 90,18 dari target 78.

(IKM 12) rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 105% / realisasi 100 dari target 95.

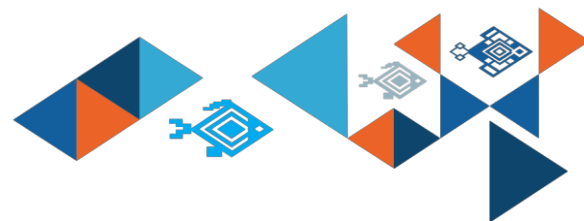
(IKM 16) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 120% / realisasi 100 dari target 76.

Total pagu anggaran tahun 2025 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 39.810.520.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNBPN dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 6,235,939,278 ,-** atau dengan prosentase sebesar **15,66%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 19,02%** Dimana ada blokir sebesar Rp. 7.020.108.000,-.



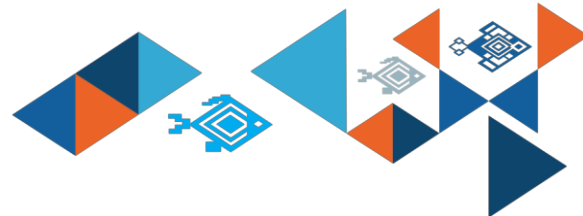
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
.....	8
I. PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3 Tugas dan Fungsi	8
1.4 Organisasi.....	9
1.6 Sistematika Penyajian.....	12
.....	14
II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT	23
2.4 Postur Anggaran 2025	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian kinerja.....	27
3.1.1 IKU1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi).....	27
3.1.2 IKU2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar	28
3.1.3 IKU3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL MakassarDokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen).....	29
3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai).....	32
3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen).....	35
3.1.6 IKU5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	37
3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	38
3.1.9 IK9 N ilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai).....	44
3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	46
3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks).....	47
3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	50
3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%).....	51
3.1.13IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	53
3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai).....	54



3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%).....	56
3.1.16IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	57
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)	60
3.3 Akuntabilitas Keuangan	63
IV. PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Rekomendasi.....	65
4.3 Tindak Lanjut	65

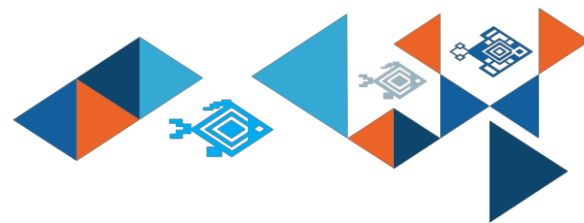




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar	11
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025.....	16
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025	21
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025.....	24
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW II Tahun 2025	25
Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	27
Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	28
Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis).....	29
Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4	33
Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5	36
Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5	37
Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	39
Tabel 14 Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	43
Tabel 15 Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai) 45	
Tabel 16 Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen).....	46
Tabel 17 Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	49
Tabel 18 Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	51
Tabel 19 Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%).....	52
Tabel 20 Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	53



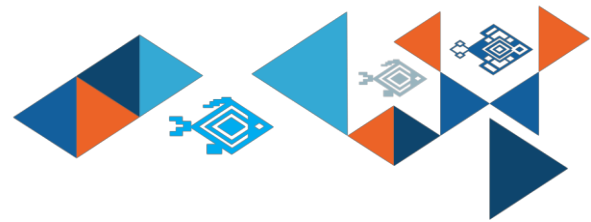


Tabel 21 Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	55
Tabel 22 Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	57
Tabel 23 Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	58
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL	60
Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025	63
Tabel 26. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2025	64
Tabel 27. Tindak lanjut atas rekomendasi TW I Tahun 2025	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.....	9
Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025	10
Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahkan Presiden serta Agenda Perubahan	14
Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku	25
Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar	30



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja TW II ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekesistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 37/MEN/2021 Tanggal 6 September 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Berkedudukan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi



Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2025.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

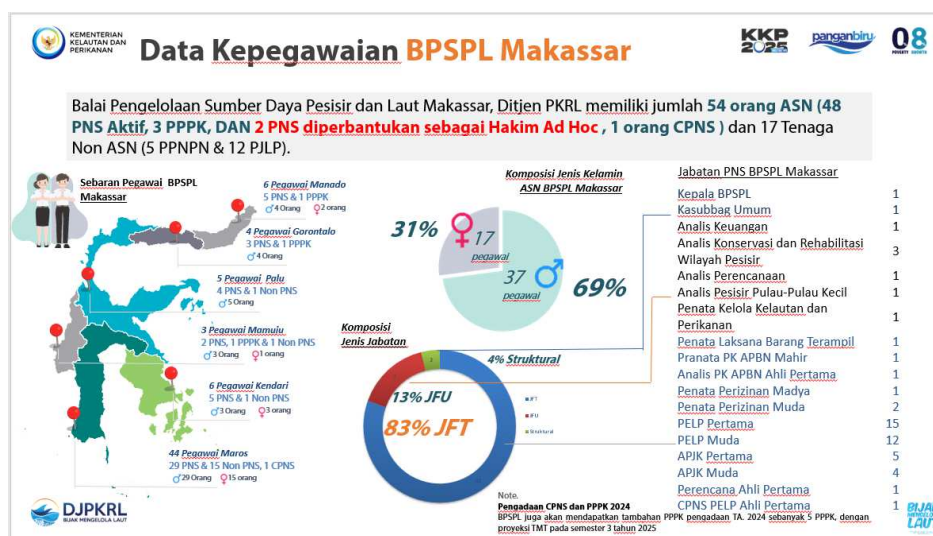
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon III A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan

fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

- A. Sub Bagian umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Penata Laksana Barang Terampil 1 (satu) orang, Pranata PK APBN Mahir 2 (Dua) orang, dan Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama. Pada Sub Bagian Umum juga terdapat kelompok jabatan fungsional umum yang terdiri dari Analis Perencana 1 (satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini baru ada 1 (satu) orang petugas fungsional tertentu Perencana Ahli Pertama yang membantu tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi, selebihnya dibantu oleh tim kelompok jabatan fungsional tertentu dalam bidang teknis.
- B. Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir (PELP) dengan jumlah 28 (Dua Puluh Delapan), Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) dengan jumlah 9 (Sembilan) orang. Penata Perizinan dengan jumlah 3 (tiga) orang dan fungsional umum dengan jumlah 3 (tiga) orang. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 12 (dua belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda dan 1 (Satu) orang Fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) yang masih berstatus CPNS , 6 (enam) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, 4 (empat) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Konservasi dan Rehabilitasi, 1 (satu) orang Analis Pulau-Pulau Kecil dan 1 (satu) orang Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.

Berikut ini adalah jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2025:



Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)						P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
D3	2	1						3
D4				3				3
S1	9	15	1	4			3	32
S2		1	1	6	7	1		16
Jumlah Total	11	17	2	13	7	1	3	54

Pada Tahun 2025, jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 54 (Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari 50 (Empat Puluh Sembilan) PNS, 1 (Satu) CPNS dan 3 (tiga) orang P3K. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 3 (Tiga) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNPB.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNPB di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi antara lain:

1. Pada DIPA BPSPL Makassar terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 7.020.108.000,- pada kegiatan 1) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut 2) Sosialisai, verifikasi dan pengendalian PKKPR 3) Identifikasi Perizinan Pulau-Pulau Kecil terblokir dan Pemeliharaan Gedung dan bangunan pada dukungan manajemen.
2. Adanya pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sampai dengan terbitnya surat persetujuan dari Menteri KKP Dimana proporsi paling besar

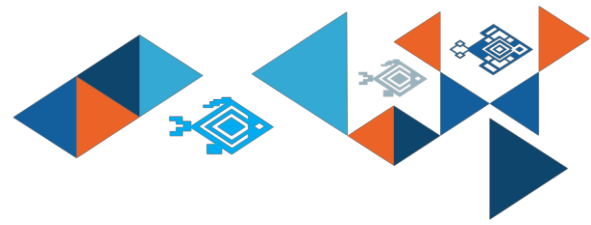


- kegiatan teknis bersumber dari dana PLN (Program Lautra). Anggaran dari sumber PLN baru kembali dibuka hamper diakhir periode semester I sehingga kegiatan baru disusun kembali perencanaannya.
3. Dengan adanya blokir dan pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pelayanan perizinan maupun kegiatan teknis lainnya.
 4. Komposisi anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025, 62,27%nya berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) atau 94,38% dari anggaran kegiatan teknis, yang mana kegiatan PLN tersebut untuk menunjang kegiatan LAUTRA.
 5. Proporsi yang besar pada kegiatan lautra//PLN mempengaruhi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, Dimana dari 6 wilayah kerja hanya 4 wilayah kerja yang merupakan Lokasi kegiatan lautra.
 6. Kegiatan Survey Biota Perairan di luar wilayah kegiatan Lautra tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran padahal kegiatan tersebut sangat menunjang data dukung pengusulan kuota pengambilan alam di tahun berikutnya.
 7. Persiapan pengalihan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Perairan kepada KKP diperlukan penunjang sarpras dan SDM khususnya di UPT.
 8. Kegiatan bidang konservasi di luar Lokasi LAUTRA khususnya terkait dengan pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi sebagai salah satu Upaya peningkatan EVIKA sulit untuk dilaksanakan.
 9. Belum dibedakan kedalaman data untuk permohonan KKPRRL antara pemohon yang akan memanfaatkan ruang laut untuk skala dan resiko kecil dengan skala dan resiko besar.
 10. Belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.
 11. Masih banyak adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunnya potensi PNBP.
 12. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
 13. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan, kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:





A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2025 dan penetapan kinerja Tahun 2025 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

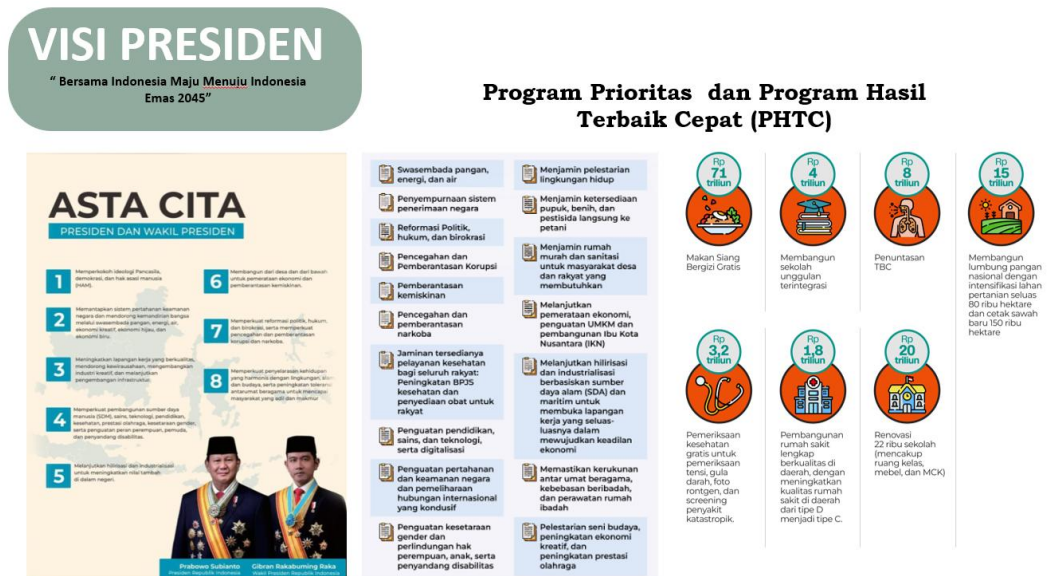
Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2025-2029, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat tentang Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti pada Gambar berikut:



Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahan Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-20245. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN tahun 2025-2029 juga mendasi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi



awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, demikian disebutkan dalam dokumen narasi RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres nomor 12 tahun 2025.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan



lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Presiden serta RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang saat ini masih dalam tahap finalisasi rancangan. Renstra KKP Tahun 2025-2029 yang nanti akan disahkan akan menjadi dasar dari penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) serta akan menjadi pedoman bagi BPSPL Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat total 16 Indikator Kinerja, jumlah ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2024 yang berjumlah 22. Berikut adalah detail perbandingan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2024 dan 2025:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Makassar	-	
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	



SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar
7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar
9	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		-
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran		-
11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar
	-	1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar
	-	6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar





Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 dan tahun 2025:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
1	Nilai PNPB BPSPL Makassar (Rp.)	-	
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	-	
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	-	
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	-	
6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	-	
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi	-	





INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
	di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)		
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	-	
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	-	
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	-	





INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)
-		1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
-		6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
-		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)
-		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
-		4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 mengalami revisi pada bulan juni, selain revisi target pada Perjanjian Kinerja Juni juga ada tambahan satu indikator kinerja sehingga total indikator kinerja yang awalnya terdiri **16 Indikator Kinerja** menjadi **17 Indikator Kinerja** adapun tambahan indikator kinerja itu adalah **Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)**, sehingga Indikator Kinerja BPSPL Makassar setelah revisi terdiri dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 terdapat pengurangan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 dari yang sebelumnya ada 11 IKU. Dari 11 IKU di tahun 2024 ada 3 (Tiga) IKU yang sama dan 2 (Dua) IKU Lainnya berbeda sedangkan pada Indikator Kinerja Menejerial (IKM) pada tahun 2024 dan 2025 sama terdapat 11 IKM, namun terdapat 2 (Dua) jenis IKM yang berbeda.

Adapun IKU yang sebelumnya terdapat di tahun 2024 dan tidak terdapat di tahun 2025 antara lain:

1. Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)
2. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
3. Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan KonservasiPerairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL





Makassar (Daerah)

5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
6. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
7. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar

Adapun IKU baru di tahun 2025 yang tidak terdapat di tahun 2024 antara lain:

1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
2. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
3. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Penambahan dan pengurangan indikator seperti dijelaskan diatas dikarenakan beberapa faktor anatara lain:

1. Adanya perubahan komposisi anggaran pada dokumen perencanaan BPSPL Makassar dimana program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilakukan tidak dapat dianggarkan dan dilaksanakan lagi dengan adanya perubahan tersebut.
2. Terdapat program dan kegiatan baru pada BPSPL Makassar pada tahun 2025
3. Adanya penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi setiap indikator untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja.
4. Terkait penambahan Indikator Kinerja Utama Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai) hal tersebut untuk mengakomodir target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berikut ini adalah perjanjian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	175





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80
4.	Terselenggaranya pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	70
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5
		10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95
		13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	80
		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76
		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91

2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 8 Sasaran Program, dan 11 Indikator Kinerja Program. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2025 terdiri dari Tiga Program, Enam Sasaran Kegiatan, dan 16 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah, Jenis keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan yang mendukung nilai efektifitas pengelolaan biota perairan, dan indikator manajemen yang ada di BPSPL Makassar mendukung capaian indikator nilai implementasi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



2.4 Postur Anggaran 2025

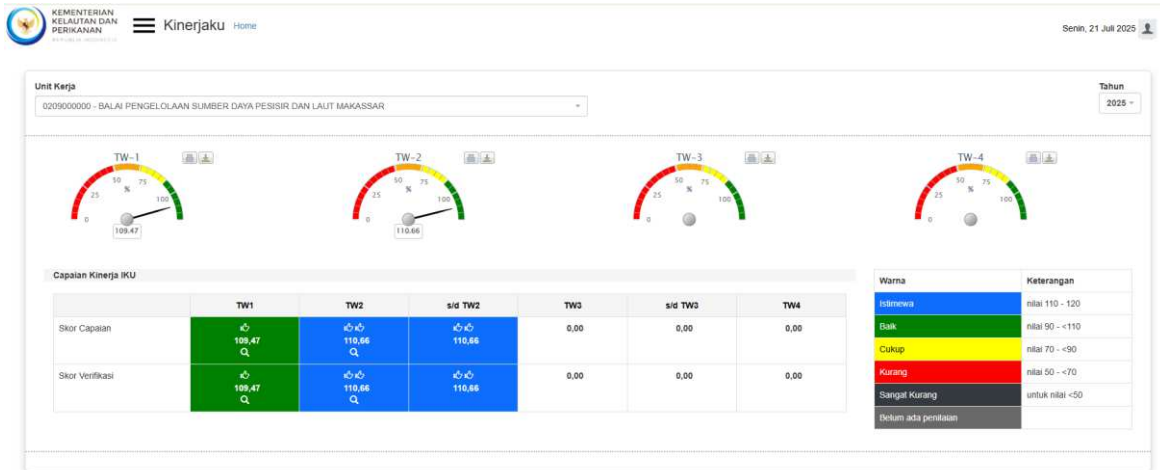
Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp 39.810.520.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 13.546.590.000,-** (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni**, **Rp. 1.475.000,-** (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari **PNBP** dan **Rp. 24.788.930.000,-** (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)) dari **PLN** . Dari Pagu anggaran di atas terdapat blokir anggaran sebesar Rp. Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga pagu efektif BPSPL Makassar sebesar **Rp. 32.790.412.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) . Blokir ini terdapat di program perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, Perencanaan Ruang Laut dan Dukungan Manajemen. Berikut ini adalah tabel postur anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025.

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025

KODE/ NAMA KEGIATAN	RUPIAH MURNI (000)	PNBP (000)	PLN (000)	TOTAL (000)	BLOKIR (000)
Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	0	300.000	24.788.930	25.088.930	6.148.568
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci;	0	300.000	0	300.000	55.000
Perencanaan Ruang Laut	0	875.000	0	875.000	505.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.590	0	0	13.546.590	311.540
Jumlah	13.546.590	1.475.000	24.788.930	39.810.520	7.020.108

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Triwulan II tahun 2025 terdapat tiga (5) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang terdapat capaian targetnya. Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan II Tahun 2024 adalah **110,66** dengan predikat **"Istimewa"**.

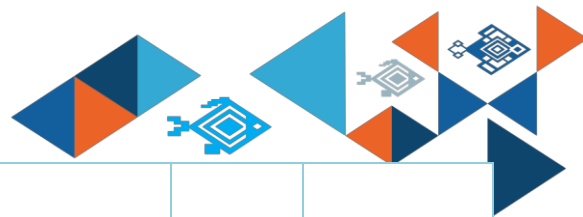


Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%	Capaian TW II Terhadap 2025
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	175	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	-	-	-	-



4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80	-	-	-	-
5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2	-	-	-	-
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1	-	-	-	-
7	(Dokumen)Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar	70	-	-	-	-
8	(Nilai)Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89	85	92,51	108,84	92,5
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	1	1	100	2
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80	78	90,18	115,62	90,1
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95	95	100	105,26	100
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	80	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76	76	100	131,57 atau	200





					120 (kinerja) aku)	
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91	-	-	-	-

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dilakukan fasilitasi oleh BPSPL Makassar dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

Adapun Capaian IKU 1 Pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar

SS -1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thdp TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	4	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini tidak terdapat di tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II ini masih dalam tahap





persiapan/perencanaan ulang dikarenakan sumber anggaran kegiatan berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang baru dibuka pada akhir periode TW II (semester I)

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena kegiatan belum bisa dilaksanakan analisis efisiensi penggunaan sumber Daya belum dapat dilakukan

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.2 IKU2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 2 Pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar

SS -1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	175	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II ini masih dalam tahap





persiapan/perencanaan ulang dikarenakan sumber anggaran kegiatan berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang baru dibuka pada akhir periode TW II (semester I).

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 belum ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena kegiatan belum bisa dilaksanakan analisis efisiensi penggunaan sumber Daya belum dapat dilakukan

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 IKU3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Apendiks dan Pari Apendiks);
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Napoleon, Teripang dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Sidat, Teripang, dan Napoleon di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies dan Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 3 Pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

SS -1	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	5	-

A. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan



II Tahun 2025.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja pada IKU ini antara lain:

1. Pelayanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Dalam Negeri untuk Jenis Ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES
Sampai dengan akhir periode Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES melalui penerbitan SAJI DN di wilayah kerja BPSPL Makassar sebanyak 79 Dokumen dan 4 Dokumen SAJI DN Tentengan. Penerbitan SAJI DN selama periode Triwulan II diterbitkan untuk komoditas jenis Hiu dan Pari Apendiks, Sidat, BCF, Napoleon dan Arwana.

2. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi (SR) Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) untuk jenis ikan kategori *look alike species*

Untuk jenis ikan kategori *look alike species* sampai dengan akhir periode Triwulan II telah diterbitkan sebanyak 368 dokumen yang terdiri dari 337 Dokumen SR DN dan 31 dokumen SR LN. Penerbitan SR selama periode Triwulan II diterbitkan untuk komoditas jenis Teripang, Hiu dan Pari Look alike species, Anemon dan Soft Coral.

Berikut adalah infografis pelayanan perizinan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan dan Surat Rekomendasi di wilayah kerja BPSPL Makassar selama periode Triwulan II (Semester I) 2025:



Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan Surat Rekomendasi yang paling banyak adalah dari jenis **Teripang** dengan total surat rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **137 Rekomendasi**, disusul dengan soft coral, anemone, dan Hiu Pari. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak 74 dokumen SAJI, disusul dengan sidat, Napoleon, Arwana dan BCF.



Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KKHL. Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KKHL walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam penerbitan Surat Rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis ikan baik yang masuk Appendix CITES dan dilindungi serta *look alike species* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* dikarenakan adanya efisiensi dan blokir anggaran yang sampai dengan berakhirnya periode Triwulan II masih belum dapat digunakan.

D. Kegiatan pendukung

Selain pelayanan perizinan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi, IKU 3 juga didukung progress capaiannya melalui kegiatan konsultasi perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk dalam daftar appendiks CITES. Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan baik secara offline (langsung) maupun secara *Online* melalui kontak layanan yang bisa diakses melalui whatsapp. Kegiatan konsultasi perizinan memberikan ruang bagi pelaku usaha pemanfaat jenis ikan/calon pelaku usaha untuk mengetahui berbagai hal tentang tata Kelola pemanfaatan jenis ikan .



dilindungi dan /atau termasuk dalam daftar appendiks CITES serta bagaimana alur perizinan untuk pemanfaatan jenis ikan.





E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan II Tahun 2025 kegiatan pelayanan penerbitan saji maupun surat rekomendasi yang mendukung progress capaian IKU 3 dioptimalkan dilaksanakan secara *online*, termasuk dalam pelaksanaan verifikasi produk yang merupakan salah satu bagian dari proses bisnis penerbitan dokumen baik saji maupun surat rekomedasi. Meskipun pelayanan tidak menjadi optimal, namun dengan kegiatan yang dioptimalkan dilakukan secara *online* ini mendukung efisiensi anggaran dan terlebih lagi hingga akhir periode Triwulan II sumber anggaran untuk IKU ini berasal dari PNBPN yang masih diblokir.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 3 pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk dalam daftar apendiks CITES dan pendataan jenis ikan hiu dan pari melalui kegiatan enumerasi.

3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar terdiri dari Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike Species (SR).

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (\text{bobot aspek} \times \sum A) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum B) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum C) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

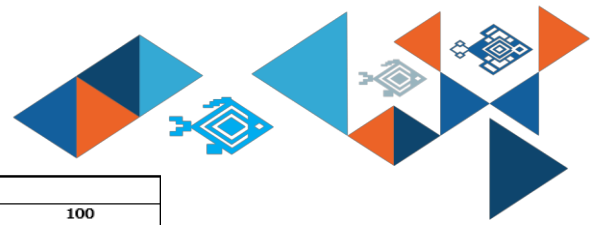
(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan Komponen Perhitungan:





Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai indikator		
				50	75	100
Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI	40%	Dashboard SIPJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		SDM	30%	Ketelitian rendah	ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Berita Acara	10%	Koreksian > 50%	Koreksian >50%≤75%	Tidak ada koreksian
		kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI-DN	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

Capaian IKU 4 pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4

SS -4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

IKU ini tidak memiliki target Triwulan II karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.



C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

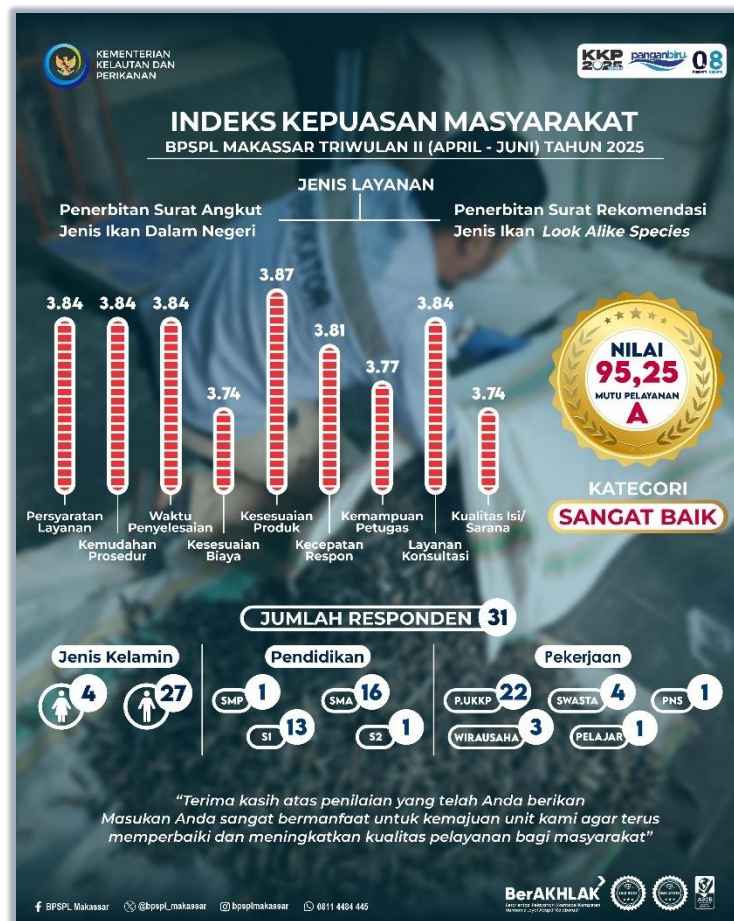
Capaian IKU 4 pada Triwulan II 2025 belum dilakukan penilaian, namun hingga TW II tahun 2025 BPSPL Makassar telah melakukan Pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Adapun Standar Pelayanan untuk penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi ditetapkan melalui Penetapan Kepala BPSPL Makassar nomor B.1119/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024 dan B.1118/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024. Terhadap kedua standar layanan tersebut telah dilakukan review secara internal dan melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada 30 Juni Tahun 2025.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 4 yang dilaksanakan pada Triwulan II 2025 diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat TW II

Hasil survey Kepuasan Masyarakat TW II untuk pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi pada Tri Wulan ke II mendapatkan nilai 92,25 dengan kategori “sangat baik.” Unsur yang dinilai terdiri dari 9 unsur terdiri dari persyaratan layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan respon, kemampuan petugas, layanan konsultasi dan kualitas sarana/prasarana.



2. Pelaksanaan Bimtek Budaya Pelayanan Prima pada tanggal 30 Juni 2025

Bimtek Budaya pelayanan prima dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 30 Juni

2025, bertempat di ruang rapat Kantor BPSPL Makassar di Maros dan juga melalui media daring Zoom Cloud Meeting. Materi pelatihan meliputi *Service Excellence*, *Great Communication*, *Handling Customer Complaint*, dan ditutup dengan sesi simulasi studi kasus atau roleplay untuk meningkatkan pemahaman pegawai BPSPL Makassar dalam menghadapi situasi pelayanan nyata.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan II Tahun 2025 kegiatan pelayanan penerbitan SAJI DN dan Penerbitan Surat Rekomendasi yang mendukung progress capaian IKU 4 dioptimalkan pelaksanaannya secara *Online*. Adapun kegiatan yang mendukung pelayanan seperti review standar pelayanan ataupun bimtek pelayanan prima yang mendukung kualitas SDM dilakukan secara *hybrid* (*offline* maupun *online*)

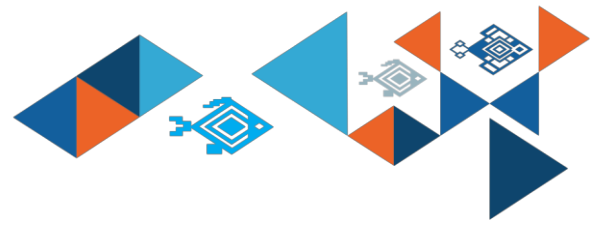
F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pelaksanaan Pelayanan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi, Survey Kepuasan Masyarakat TW II, konsultasi layanan, Penetapan Kuota Pengambilan Alam Tahun 2 tahun 2025 dan Pengusulan Kuota Pengambilan Alam untuk Tahun 2026.

3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Capaian IKU 5 pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5

SS -5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	2	-

G. Capaian Indikator Kinerja Utama

IKU ini tidak memiliki target Triwulan II karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025

H. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

I. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Progres capaian IKU 4 pada Triwulan II 2025 adalah BPSPL Makassar sudah melaksanakan penilaian teknis terhadap 124 subjek hukum di wilayah kerja BPSPL Makassar dimana 100 Penilaian teknis dengan penyelenggara Direktorat Penataan Ruang Laut dan 24 Penilaian teknis dengan penyelenggara BPSPL Makassar dengan sebaran wilayah subjek hukum meliputi Sulawesi Tengah 53, Sulawesi Tenggara 32, Sulawesi Selatan 24, Sulawesi Barat 3 , Sulawesi Utara 10 dan Gorontalo 2.

J. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 4 yang dilaksanakan pada Triwulan II 2025 diantaranya adalah konsultasi perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Penilaian Teknis Permohonan perizinan KKPRL





K. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama periode Triwulan II Tahun 2025 kegiatan penilaian teknis penerbitan PKKPR (Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang mendukung progress capaian IKU 4 dioptimalkan pelaksanaannya secara *Online*. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum ada kegiatan verifikasi lapangan penerbitan PKKPR dikarenakan sumber anggaran untuk IKU ini berasal dari PNPB yang masih diblokir.

L. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pelaksanaan kegiatan penilaian teknis dan kegiatan pengendalian KPR.

3.1.6 IKU5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Teknik menghitung capaian IKU ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5

SS -6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IKU - 6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IKU 5 Triwulan II Tahun 2025

IKU ini tidak memiliki target Triwulan II karena frekuensi pengukuran capaiananya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Solusi

Tidak ada progres kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II 2025 untuk menunjang capaian IKU 5 ini karena anggaran untuk mendukung pelaksanaan IKU 5 ini masih di Blokir.





D. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan II 2025 untuk menunjang capaian IKU 5 ini karena anggaran untuk mendukung pelaksanaan IKU 5 ini masih di Blokir.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena kegiatan belum bisa dilaksanakan analisis efisiensi penggunaan sumber Daya belum dapat dilakukan

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan, pelaksanaan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Pulau Selayar, di Kepulauan Sermonde dan Gorontalo.

3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
 2. Pengukuran kinerja (30%)
 3. Pelaporan kinerja (15%), dan
 4. Evaluasi kinerja (25%).
1. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
 2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.





Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	70	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara tahunan.



C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II ini adalah proses pemenuhan dokumen untuk Penilaian Mandiri SAKIP yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, Dokumen Pelaporan Kinerja dan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi Triwulan I tahun 2025
2. Verifikasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2025
3. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi BPSPL Makassar Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai indikator kinerja ini memaksimalkan sumberdaya yang ada secara optimal dan untuk pertemuan-pertemuan dilakukan secara *online* sehingga tidak ada anggaran yang digunakan atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III 2025 antara lain melengkapi dokumen pendukung untuk pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP.

3.1.8 IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apabila bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
 - a) Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu Triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu Triwulan (tidak kumulatif)





- b) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- c) Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = t - 1 \times RRev_{nn}$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%

- a) Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) bulanan
- b) Nilai RPD dikunci setiap awal Triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus Triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- c) Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA_{BPeg} = |R_{BPeg\ n} - RPD_{BPeg\ n}| / RPD_{BPeg\ n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA_{BBar} = |R_{BBar\ n} - RPD_{BBar\ n}| / RPD_{BBar\ n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA_{BMod} = |R_{BMod\ n} - RPD_{BMod\ n}| / RPD_{BMod\ n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA_n = (|DevDIPA_{BPeg} + DevDIPA_{BBar} + DevDIPA_{BMod}|) / 3$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- a) Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan
- b) Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap Triwulan
- c) Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- d) Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$[TA]_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$[TPBelPeg]_n = Pagu_{BPeg} \times Target_{BPeg\ Tw\ ke\ n}$$

$$[TPBelBar]_n = Pagu_{BBar} \times Target_{BBar\ Tw\ ke\ n}$$

$$[TPBelMod]_n = Pagu_{BMod} \times Target_{BMod\ Tw\ ke\ n}$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$[NKPA]_n = ((PA_n) / (TP_n)) \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- a) Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- b) Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak





- c) Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- d) Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan II mendapat poin 100, Triwulan III 90, Triwulan IIII 80, Triwulan IIV 70.
 $KPA\ BK = NK - Kw * 40\% + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- a) Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- b) 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- c) Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik
 $RKPT = SPM\ LS\ TWSPM\ LS \times 100$
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- a) Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- b) Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- a. Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggung jawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.
 $NK - UPKW = i = 1 \times n \times KWUP + n \times PTUP$
- c) Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- d) $\%GUP\ disebulankan = \%GUP \times (jml\ hari\ sebulan) / \Delta t\ GUP$
 $NK - PGUP = i = 1 \times n \times PGUP + n \times GUP$
- e) Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran
 $NKSetor = 100 - Setoran\ TUPTUP \times 100$
- f) Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP
 $IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$
7. Dispensasi Penyampaian SPM – (Pengurang Nilai IKPA)
- a) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada Triwulan IIV,
- b) Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:



Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

c) Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UVx 1000}}$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

a) Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)

b) Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{(i=1)}^n \text{ROKW}}{n}$$

c) Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO Triwulan II sampai dengan Triwulan IIII berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target Triwulan IIV sama dengan target RO pada DIPA

d) RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{(i=1)}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) / n$$

e) Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Tabel 14 Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
100	85	92,51	108.84	-7.49	92	100.55

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada table 13, dimana dari table tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II 2025 adalah 92,51 dari target 85 atau 108,84% dari target, .

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian indikator



yang sama pada periode Triwulan II 2024 mengalami penurunan 7.49 angka dimana capaian Triwulan II 2025 itu hanya 92.51 sedangkan capaian Triwulan II 2024 adalah 100.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian hingga melebihi target yang sudah ditetapkan dikarenakan BPSPL Makassar berhasil memaksimalkan capaian 5 indikator dari 8 indikator penilaian kelima indikator yang mencapai nilai maksimal adalah Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output dan Dispensai SPM sedangkan tiga indikator yang belum mendapatkan nilai maksimal yaitu Revisi Halaman 3 DIPA, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP dan TUP. Adanya 3 indikator yang tidak dapat nilai maksimal dikarenakan adanya blokir anggaran yang tidak dapat digunakan namun anggarannya masih ada dalam DIPA BPSPL Makassar hal tersebut yang membuat 3 indikator tidak mendapatkan nilai maksimal, sehingga capaian Triwulan II 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2024.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini meliputi :

- Melakukan Revisi DIPA dan Halaman 3 DIPA tepat waktu
- Mendapatkan dan melakukan pembayaran belanja Kontraktual tepat waktu
- Penyelesaian Tagihan tepat waktu
- Pengelolaan UP dan TUP dengan baik
- Pengisian capaian output tepat waktu
- Penyerapan anggaran sesuai target
- Mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan SPM

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Operator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III 2025 antara lain melaksanakan koordinasi yang baik secara konsisten antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan untuk dapat memaksimalkan capaian 8 indikator kinerja tersebut.

3.1.9 IK9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas



dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO	: Capaian RO Penggunaan SBK
Penggunaan SBK	: Penggunaan SBK
NEAlokasi	: Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO	: Bobot Capaian RO
Wpenggunaan SBK	: Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 15 Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	71,5	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II adalah koordinasi yang baik antara



bagian program perencanaan dan keuangan selaku operator capaian output. Hal ini dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai pada Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah melakukan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan capaian output dan perencanaan dalam penyusunan SBK pada penyusunan perencanaan anggaran. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP Triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IIV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 16 Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
2	2	2	100	0	4	50

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini adalah 2 (dua) laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 yang telah disusun dan dilaporkan ke sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 adalah sama dimana realisasinya adalah 2 (dua) dokumen pada Triwulan II tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian Triwulan II adalah karena koordinasi yang baik dari





semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.

D. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah penyusunan dan pengusulan TIM SPIP tahun 2025 dan pelaksanaan koordinasi yang baik dalam setiap penyusunan laporan SPIP kepada seluruh tim.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

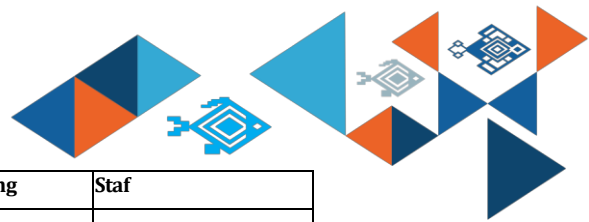
- a) Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLT A / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi
----	---------------------	------------------





		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

b. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

c. Disiplin bobot nilai 5

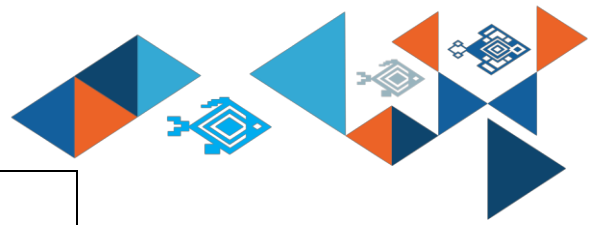
No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

d. Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
----	----------	-------





1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

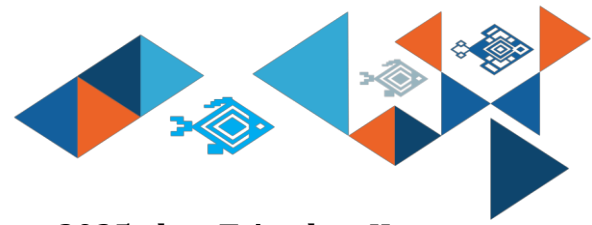
Tabel 17 Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
91.92	78	90.18	115.62	-1.74	80	112.73

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada table 16 dimana pada table tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini adalah 90.18 dari target 78





pada Triwulan II 2025 atau 115.62% dari target .

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator yang sama pada Triwulan II 2024 mengalami penurunan -1.74 dimana capaian Triwulan II 2025 adalah 90.18 sedangkan capaian Triwulan II 2024 adalah 91.92, penurunan tersebut salah satunya adalah karena jumlah pegawai yang mendapatkan nilai sangat tinggi di Triwulan II 2025 mengalami penurunan dari Triwulan II 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian indikator kinerja ini sudah melebihi target yang ditetapkan dimana capainya adalah 90.18 dari target 78 keberhasilan pencapaian yang melebihi target tersebut adalah diakrenakan keaktifan seluruh pegawai BPSPL Makassar untuk mengikuti pelatihan yang ada baik offline maupun online dan mengupload sertifikat pelatihanya di aplikasi MySPAK Badan Kepegawaian Negara.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 terdapat kegiatan Pelatihan Internal Pelayanan Publik dan Bimbingan Teknis Pemetaan dalam Mendukung Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada Senin – Kamis, 10 – 13 Maret 2025, dan juga pelatihan-pelatihan online maupun offline lainnya baik yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun oleh instansi lain.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam peningkatan kompetensi salah satunya karena banyak Pelatihan, Bimtek maupun seminar yang dilakukan secara *online*, sehingga sangat memudahkan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa anggaran.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain penyampaian informasi pelatihan atau bimbingan teknis serta seminar kepada pegawai BPSPL Makassar.

3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.



Tabel 18 Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS - 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
100	95	100	105,26	0	80	125

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar sebesar 100 dari target Triwulan II sebesar 95 dengan presentase 105,26% dari target. Pada Triwulan II telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Kegiatan PHLN Ocean for Prosperity – LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024; dan Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di BPSPL Makassar, dari 11 (sebelas) jumlah rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut seluruhnya sehingga presentase capaian jumlah tindak lanjut sebesar 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 100 apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024 sebesar 100 dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan capaian apabila dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan dukungan dan arahan dari pimpinan tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi oleh seluruh staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 adalah mengikuti Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025 dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut dengan Sesditjen PKRL serta Inspektorat I KKP.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian rekomendasi itjen tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang



ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2024.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerja adalah 100.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

3. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
4. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 19 Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

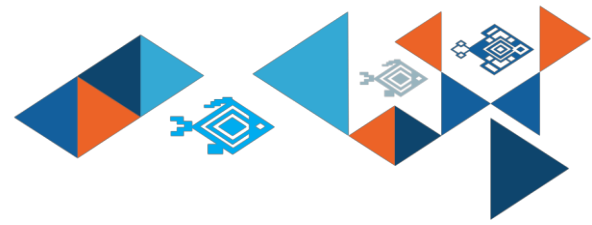
C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan .

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II belum ada





kegiatan pendukung.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.13 IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “sbnm67Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 20 Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian





Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara Tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan.

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II BPSPL Makassar telah dilakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas terhadap unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) pada tanggal 25 Februari s.d 3 Maret 2025 secara *Online*. Kegiatan ini dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB..

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.

3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

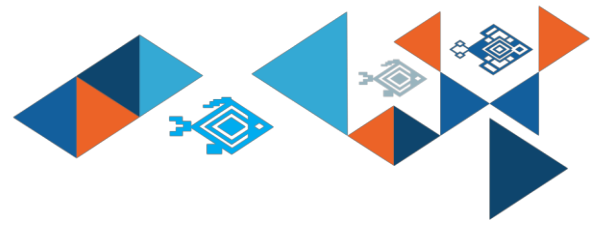
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

1. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:





- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 21 Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	80	-

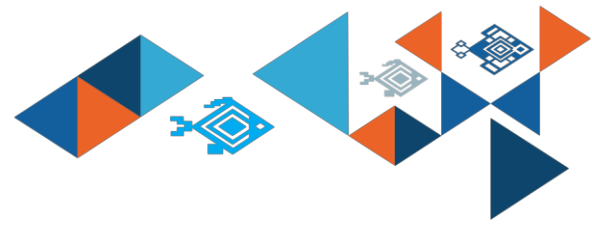
A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan





pengukurannya secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta Solusi tidak dapat dilakukan.

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II belum ada kegiatan pendukung.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan audit kearsipan.

3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.



Tabel 22 Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS - 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	76	100	120	-	76	120

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar 100 dari target Triwulan II sebesar 76 dengan presentase 120% (Kinerjaku) dari target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan koordinasi yang baik antara operator SIRUP dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam penyusunan dokumen pengadaan dan penginputan sirup secara tepat waktu.

D. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2025 adalah mengikuti asistensi dan diskusi terkait penyesuaian SIRUP pasca efisiensi anggaran tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ pada 12 Maret 2025 secara *online*.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian indikator ini tersebut tidak menggunakan anggaran pada Triwulan II sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah revisi RUP pasca dilakukan revisi anggaran.

3.1.16 IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup BPSPL Makassar sesuai dengan kriteria:

- informatif dengan nilai 97-100;
- menuju informatif dengan nilai 80-96;

- c. cukup informatif dengan nilai 60-79;
- d. kurang informatif dengan nilai 40-59;
- e. tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai

No		ASPEK YANG DINILAI	SUB-NILAI	PRESENTASI	TOTAL	BOBOT	HASIL
TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare)							
1	Mengumumkan Informasi Publik		15	60%	60	80%	80
2	Menyediakan Dokumen Informasi		25				
3	Sarana Prasarana		30				
4	Kelembagaan		20	40%	40		
5	Digitalisasi		10				
Jumlah			100	100%	100		
TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INOFORMASI PUBLIK							
1	Presentasi Publik		100	100%	100	20%	20
Jumlah			100	100%	100		
TOTAL NILAI KESELURUHAN						100%	100

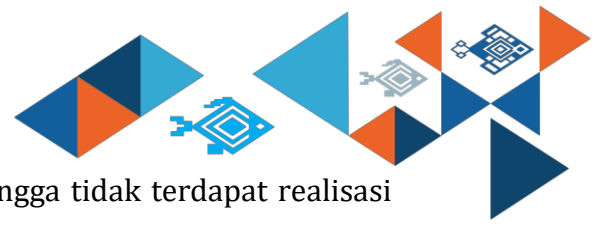
Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung

Tabel 23 Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thdp PK
-	-	-	-	-	91	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target Triwulanan karena frekuensi



pengukuran capaiannya dilakukan secara Tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja yang dilakukan pengukurannya secara tahunan dan juga indikator ini merupakan indikator baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi tidak dapat dilakukan.

D. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II belum ada kegiatan pendukung.

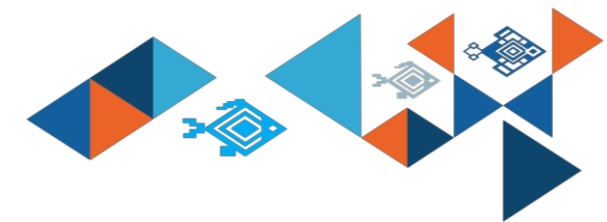
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan III 2025 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik.



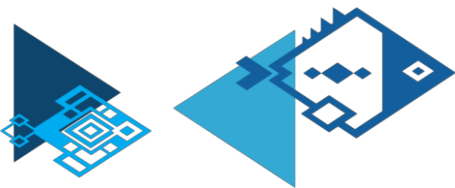


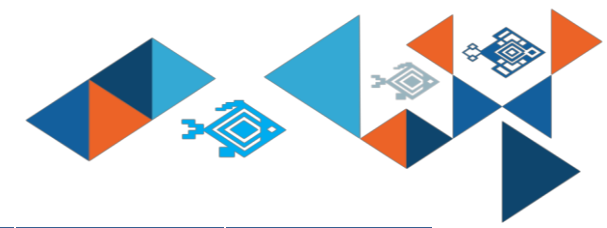
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

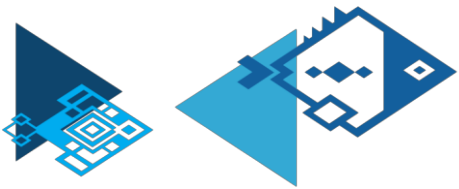
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

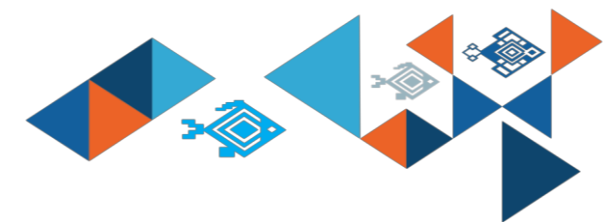
Indikator Kinerja			BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	Target	4	1	3	1	1	3
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	Target	175	24	25	30	30	20
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	Target	5	4	5	5	5	3
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-



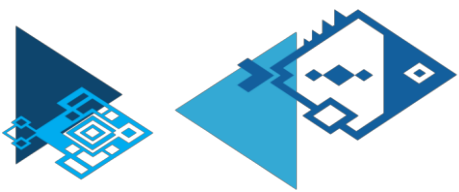


5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	2	2	2	2	2	2
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	88	88	88	88	88	88
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	92	92	92	92	92	92
		Capaian	92,51	97,8	98,08	95,80	98,88	83,89
		%	100,55	106,30	106,60	104,13	107,48	91,18
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	4	4	4	4	4	4
		Capaian	1	1	1	1	1	1
		%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	90,18	86,26	88,51	84,22	85,53	84,62





	(Indeks)	%	112,73	107,83	110,64	105,28	106,91	105,78
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	95	95	95	95	95	95
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	100	100	100	100	100	100
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	Target	75	85	85	75	75	75
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	76	76	76	76	76	76
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	120	120	120	120	120	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	91	91	91	91	91	91
		Capaian	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-



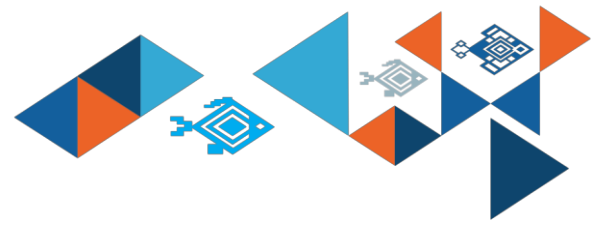
3.3 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	25.088.930.000	0	-	25.088.930.000
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000,000	0	-	300,000,000
Penataan Ruang Laut	875,000,000	0	-	875,000,000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	13.546.590.000	6.235.939.278	46.03	7.310.650.722
TOTAL	39.810.520.000	6.235.939.278	15,66	33.574.580.722

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2025, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 39.810.520.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNPB dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp.6.235.939.278 ,-** atau dengan prosentase sebesar **15,66%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir . Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 17,16%** Dimana ada blokir sebesar **Rp. 8.029.608.000,-**. Sisa anggaran adalah sebesar **Rp 36.341.753.062,- (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).**

Sampai dengan Triwulan II 2025 revisi anggaran sudah dilaksanakan lima kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:



Tabel 26. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2025

Tanggal	Keterangan
9 Januari 2025	Revisi 1 dalam rangka Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431/2025 untuk revisi penyesuaan kebutuhan pada sub komponen operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan surat nomor: B.74/BPSPL.3/RC.420/I/2025 pada tanggal 09 Januari 2025;
13 Januari 2025	Revisi 2 dalam rangka revisi Petunjuk oprasional Kegiatan (POK) sesuai dengan kewenangan KPA, revisi ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor tanggal 13 Januari 2025;
22 Februari 2025	Revisi 3 dalam rangka efisiensi anggaran kebijakan pemerintah tahun 2025 pada 22 Februari 2025.
17 April 2025	Revisi 4 dalam rangka revisi halaman 3 DIPA sesuai dengan surat Plt Kepala BPSPL Makassar No: B.339/BPSPL.3/RC.420/IV/2025
26 Mei 2025	Revisi 5 Pembukaan Blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN Sebesar Rp. 900.000.000,- melalui surat Plt. Kepala BPSPL Makassar nomor: B.445/BPSPL.3/RC.420/V/2025 perihal Usulan Pembukaan Blokir





IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Triwulan II Tahun 2025 adalah kategori **Istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **110,66%**, sementara capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar **Rp. 6,235,939,278 ,- (Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** atau dengan prosentase sebesar **15,66%** dari pagu total **Rp 39.810.520.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**. Terdapat Blokir anggaran sebesar Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), sehingga presentasi realisasi tanpa blokir sebesar **19,02 %**.

Capaian Indikator Kinerja Manajerial pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

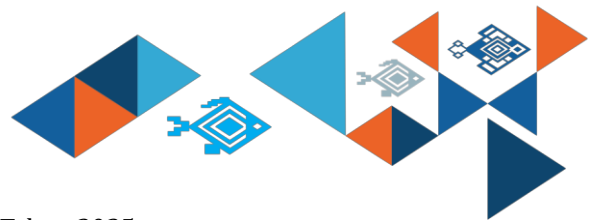
1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar telah melampaui target dengan capaian 109% / realisasi 92,51 dari target 85 untuk triwulan II
2. Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target Triwulanan dengan capaian satu laporan dari target satu laporan.
3. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan capaian 116% / realisasi 90,18 dari target 78.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 105% / realisasi 100 dari target 95.
5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 120% / realisasi 100 dari target 76.

4.2 Rekomendasi

Terdapat rekomendasi untuk mendukung kinerja pada Triwulan III yaitu penyampain kepala BPSPL Makassar kepada ketu tim kerja untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapa anggaran.

4.3 Tindak Lanjut

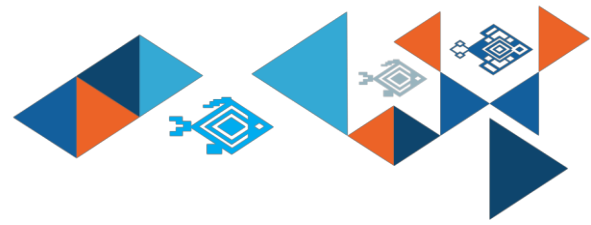
Terdapat rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2025 yang harus dilakukan tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan tabel di bawah ini:



Tabel 27. Tindak lanjut atas rekomendasi TW I Tahun 2025

Rekomendasi TW I Tahun 2025	Tindak Lanjut atas Rekomendasi TW I Tahun 2025	Tautan Data Dukung
pengusulan pembukaan anggaran blokir	Telah dilakukan pengusulan pembukaan blokir melalui surat Plt Kepala BPSPL Makassar nomor B.4555/BPSPL.3/RC.420/V/2025 perihal Usulan Revisi Anggaran Pembukaan Blokir yang disampaikan kepada Sekretaris Dirjen PK	https://drive.google.com/drive/folders/1mijrqLy2Hql3k_pMjiEjxoEyNR6kD4iL?usp=drive_link





LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.04	87.71	100.00	100.00	98.62	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.76	17.54	10.00	10.00	9.86	25.00				
			Nilai Aspek	92.52		96.58				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
			Nilai Aspek	90.65			100.00							100.00
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	97.11	100%	0.00	97.11	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.56	19.60	10.00	10.00	9.95					25.00
			Nilai Aspek	91.86			99.38							100.00
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	90.88	100%	0.00	90.88	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81					25.00
			Nilai Aspek	90.15			92.06							100.00
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	90.72	100%	0.00	90.72	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99					25.00
			Nilai Aspek	88.62			92.65							100.00



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
6	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
7	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
8	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
12	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
13	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
14	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
16	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
18	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
19	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
20	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.93	100.00	79.99	80%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
21	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				
22	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.14	100.00	99.91	100%	0.00	99.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.78				100.00				
24	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.03	100.00	99.90	100%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76				100.00				
25	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100.00	99.88	100%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				
26	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	99.85	100%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.63				100.00				
27	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.77	100.00	79.88	80%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.39				100.00				
28	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.39	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.31	100.00	99.83	100%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				100.00				
30	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
31	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	97.81	100.00	89.78	90%	0.00	99.76
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				
32	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.65	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.83				100.00				
33	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	100.00	99.49	0.00	0.00	98.59	100.00	79.76	80%	0.00	99.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.90	0.00	0.00	9.86	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.04				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.53	100.00	0.00	100.00	100.00	89.71	90%	0.00	99.67
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.71	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	99.39	100.00	100.00	96.85	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.06				100.00				
36	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.78	100.00	99.48	100%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.70				100.00				
37	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.10	100.00	99.41	100%	0.00	99.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.52				100.00				
38	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	100.00	97.31	0.00	0.00	100.00	100.00	79.46	80%	0.00	99.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.66				100.00				
39	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.33	100.00	99.23	100%	0.00	99.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				
40	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.06	100%	0.00	99.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.06	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.87		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	93.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.62		100.00				100.00				
42	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.78	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.44				100.00				
43	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.80	100.00	0.00	0.00	99.48	100.00	79.17	80%	0.00	98.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.22	20.00	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	97.40		99.74				100.00				
44	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	92.60	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	98.88	100%	0.00	98.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		99.96				100.00				
45	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	92.81	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	98.87	100%	0.00	98.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		99.87				100.00				
46	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	90.62	100.00	79.06	80%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.06	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.31				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	94.07	100.00	0.00	0.00	99.31	100.00	79.04	80%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.66				100.00				
48	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	93.38	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.01	80%	0.00	98.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.01	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.69		100.00				100.00				
49	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	91.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.55		100.00				100.00				
50	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	92.80	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.92	80%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.40		100.00				100.00				
51	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.64	100%	0.00	98.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		100.00				100.00				
52	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	90.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.56	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.19		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

53	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.74	99.74	100.00	100.00	99.60	100.00	98.52	100%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.95	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		99.84				100.00				
54	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	94.60	98.59	100.00	100.00	95.99	100.00	98.51	100%	0.00	98.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.72	10.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		98.64				100.00				
55	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	90.96	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.64	90%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.48		100.00				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	92.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.93	70%	0.00	98.47
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		100.00				100.00				
57	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		100.00				100.00				
58	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	92.70	97.84	100.00	100.00	0.00	100.00	68.91	70%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.35		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				
60	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	92.20	99.37	0.00	0.00	99.51	100.00	78.65	80%	0.00	98.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.83	19.87	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.10		99.44				100.00				
61	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	92.55	98.54	100.00	100.00	97.21	100.00	98.31	100%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	19.71	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	96.28		98.94				100.00				
62	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	91.39	98.97	100.00	0.00	99.66	100.00	88.47	90%	0.00	98.30
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.71	19.79	10.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	95.70		99.54				100.00				
63	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.96	100.00	100.00	100.00	99.44	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	94.48		99.86				100.00				
64	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	88.53	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.96	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		99.95				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

65	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	88.38	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.98				100.00				
66	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	87.45	99.90	100.00	100.00	99.97	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		99.97				100.00				
67	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	89.10	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.37	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	94.55		99.30				100.00				
68	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	94.01	100.00	100.00	100.00	89.41	100.00	98.04	100%	0.00	98.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.01		97.35				100.00				
69	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.84	99.52	0.00	0.00	100.00	100.00	78.38	80%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.90	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		99.76				100.00				
70	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.98	100%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.27		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	88.60	98.13	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.63	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.53				100.00				
72	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.55	97.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.89	100%	0.00	97.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		99.33				100.00				
73	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	93.30	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	20.00	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	96.65		97.20				100.00				
74	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.71	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.31	80%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.36		100.00				100.00				
75	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	88.75	100.00	0.00	0.00	99.81	100.00	78.29	80%	0.00	97.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.38		99.91				100.00				
76	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.84	100%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.84	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.81		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

77	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	85.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
78	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.65		100.00				100.00				
79	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.56	98.85	100.00	100.00	95.88	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.77	10.00	10.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		98.68				100.00				
80	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	87.90	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.19	80%	0.00	97.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.95		100.00				100.00				
81	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	86.99	98.20	100.00	100.00	100.00	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	19.64	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.50		99.55				100.00				
82	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	93.11	100.00	0.00	0.00	91.05	100.00	78.07	80%	0.00	97.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.97	20.00	0.00	0.00	9.10	25.00				
					Nilai Aspek	96.56		95.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	100.00	90.86	0.00	0.00	98.68	100.00	78.04	80%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.17	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		94.77				100.00				
84	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	85.15	98.42	100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	19.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.58		99.61				100.00				
85	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.45	94.59	0.00	0.00	99.73	100.00	77.91	80%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	18.92	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		97.16				100.00				
86	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	86.48	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	100%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		99.27				100.00				
87	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	82.58	100.00	100.00	100.00	99.89	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.39	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	91.29		99.97				100.00				
88	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	86.72	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.34	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.58				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

89	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	86.88	98.97	0.00	0.00	100.00	100.00	77.83	80%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.44		99.49				100.00				
90	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	81.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.19	100%	0.00	97.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.63		100.00				100.00				
91	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	84.43	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.66	80%	0.00	97.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		100.00				100.00				
92	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	86.91	100.00	100.00	100.00	90.34	100.00	97.07	100%	0.00	97.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	20.00	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		97.59				100.00				
93	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	86.91	96.60	100.00	0.00	100.00	100.00	87.36	90%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	19.32	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		98.87				100.00				
94	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.49	100.00	100.00	100.00	92.09	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	92.75		98.02				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	82.46	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.37	80%	0.00	96.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.37	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.23		100.00				100.00				
96	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.70	100%	0.00	96.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		100.00				100.00				
97	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	78.27	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	96.59	100%	0.00	96.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.74	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.14		99.63				100.00				
98	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.16	95.51	100.00	100.00	94.03	100.00	96.58	100%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	19.10	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.58		97.38				100.00				
99	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	83.01	100.00	0.00	0.00	97.73	100.00	77.22	80%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	91.51		98.87				100.00				
100	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.47	100.00	100.00	100.00	97.17	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	89.24		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	100.00	86.01	96.47	100%	0.00	96.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	10.00	10.00	10.00	21.50				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				86.01				
102	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	81.08	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.16	80%	0.00	96.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.54		100.00				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	67.50	70%	0.00	96.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.67		100.00				100.00				
104	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	86.12	97.55	0.00	0.00	97.05	100.00	77.13	80%	0.00	96.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.51	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		97.30				100.00				
105	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	85.44	95.62	100.00	100.00	94.75	100.00	96.41	100%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.12	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	92.72		97.59				100.00				
106	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.83	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	67.42	70%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	81.97	98.76	0.00	0.00	100.00	100.00	77.05	80%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.99		99.38				100.00				
108	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	89.90	100.00	0.00	0.00	85.57	100.00	77.04	80%	0.00	96.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	20.00	0.00	0.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	94.95		92.79				100.00				
109	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	86.47	100.00	0.00	0.00	90.18	100.00	76.99	80%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	20.00	0.00	0.00	9.02	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.09				100.00				
110	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.48	96.92	0.00	0.00	94.70	100.00	76.83	80%	0.00	96.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.81				100.00				
111	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	84.28	100.00	0.00	100.00	87.56	100.00	86.40	90%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.64	20.00	0.00	10.00	8.76	25.00				
					Nilai Aspek	92.14		95.85				100.00				
112	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.41	100.00	0.00	0.00	89.87	100.00	76.80	80%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.81	20.00	0.00	0.00	8.99	25.00				
					Nilai Aspek	92.71		94.93				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

113	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	84.22	100.00	0.00	0.00	90.82	100.00	76.71	80%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	20.00	0.00	0.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.11		95.41				100.00				
114	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	90.94	85.77	100.00	100.00	100.00	100.00	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	17.15	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.47		96.44				100.00				
115	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	78.39	100.00	0.00	0.00	98.39	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	89.20		99.20				100.00				
116	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	79.11	96.97	100.00	100.00	94.55	100.00	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.39	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	89.56		97.88				100.00				
117	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	82.68	100.00	0.00	0.00	90.36	100.00	76.44	80%	0.00	95.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.40	20.00	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	91.34		95.18				100.00				
118	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	81.43	100.00	100.00	100.00	91.47	96.07	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	20.00	10.00	10.00	9.15	24.02				
					Nilai Aspek	90.72		97.87				96.07				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

119	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	75.93	99.26	0.00	0.00	100.00	100.00	76.24	80%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	19.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.97		99.63				100.00				
120	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	76.48	100.00	0.00	0.00	96.90	100.00	76.16	80%	0.00	95.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	20.00	0.00	0.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	88.24		98.45				100.00				
121	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	73.48	95.86	100.00	100.00	99.75	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	19.17	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	86.74		98.90				100.00				
122	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.31	100.00	100.00	100.00	99.06	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	84.16		99.76				100.00				
123	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	85.06	91.74	100.00	100.00	89.75	100.00	95.08	100%	0.00	95.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.35	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.53		95.37				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	84.96	100.00	0.00	0.00	100.00	91.25	75.56	80%	0.00	94.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	20.00	0.00	0.00	10.00	22.81				
					Nilai Aspek	92.48		100.00				91.25				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	90.98	100.00	100.00	100.00	93.54	84.93	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	20.00	10.00	10.00	9.35	21.23				
					Nilai Aspek	95.49		98.39				84.93				
126	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	78.23	98.87	0.00	0.00	88.52	100.00	75.36	80%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.73	19.77	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.12		93.69				100.00				
127	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	80.61	100.00	100.00	100.00	67.63	100.00	93.85	100%	0.00	93.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	20.00	10.00	10.00	6.76	25.00				
					Nilai Aspek	90.31		91.91				100.00				
128	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	79.93	100.00	0.00	0.00	80.69	100.00	75.06	80%	0.00	93.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	20.00	0.00	0.00	8.07	25.00				
					Nilai Aspek	89.97		90.34				100.00				
129	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	82.99	95.37	100.00	100.00	100.00	87.67	93.44	100%	0.00	93.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	19.07	10.00	10.00	10.00	21.92				
					Nilai Aspek	91.50		98.84				87.67				
130	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.20	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		91.50				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

131	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	88.29	71.46	100.00	100.00	99.75	100.00	92.51	100%	0.00	92.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	14.29	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		92.80				100.00				
132	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	100.00	60.09	100.00	100.00	100.00	100.00	92.02	100%	0.00	92.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	12.02	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		90.02				100.00				
133	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	0.00	100.00	77.31	73.46	80%	0.00	91.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	0.00	10.00	19.33				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				77.31				
134	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	100.00	58.59	100.00	100.00	97.36	100.00	91.45	100%	0.00	91.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.72	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.99				100.00				
135	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	55.86	100.00	100.00	99.41	100.00	91.11	100%	0.00	91.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.17	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.82				100.00				
136	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	85.46	97.56	100.00	100.00	100.00	74.91	91.06	100%	0.00	91.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.51	10.00	10.00	10.00	18.73				
					Nilai Aspek	92.73		99.39				74.91				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.34	100.00	100.00	100.00	89.26	83.20	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.00	20.00	10.00	10.00	8.93	20.80				
					Nilai Aspek	86.67		97.32				83.20				
138	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	84.45	69.62	100.00	0.00	100.00	100.00	81.59	90%	0.00	90.66
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	13.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.23		89.87				100.00				
139	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	55.90	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.39	70%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.95		100.00				100.00				
140	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	74.12	72.15	100.00	100.00	100.00	100.00	90.55	100%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	14.43	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		93.04				100.00				
141	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	55.48	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.32	70%	0.00	90.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.32	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.74		100.00				100.00				
142	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	51.95	100.00	100.00	100.00	100.00	90.39	100%	0.00	90.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.99				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	70.18	87.71	100.00	100.00	87.11	94.17	90.32	100%	0.00	90.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.53	17.54	10.00	10.00	8.71	23.54				
					Nilai Aspek	85.09		93.70				94.17				
144	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	53.34	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.00	70%	0.00	90.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.67		100.00				100.00				
145	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	52.88	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.93	70%	0.00	89.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.93	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.44		100.00				100.00				
146	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	51.12	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.67	70%	0.00	89.53
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.67	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.56		100.00				100.00				
147	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	67.22	71.44	100.00	100.00	100.00	100.00	89.37	100%	0.00	89.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	14.29	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.61		92.86				100.00				
148	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	89.03	100.00	0.00	0.00	99.40	72.73	71.48	80%	0.00	89.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	20.00	0.00	0.00	9.94	18.18				
					Nilai Aspek	94.52		99.70				72.73				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
150	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
151	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
152	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
153	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	83.39	100.00	100.00	100.00	100.00	63.21	88.31	100%	0.00	88.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	20.00	10.00	10.00	10.00	15.80				
					Nilai Aspek	91.70		100.00				63.21				
154	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	100.00	68.97	100.00	100.00	83.78	82.20	87.72	100%	0.00	87.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.79	10.00	10.00	8.38	20.55				
					Nilai Aspek	100.00		88.19				82.20				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	69.09	64.61	100.00	0.00	100.00	100.00	78.29	90%	0.00	86.98
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.36	12.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.55		88.20				100.00				
156	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
157	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
158	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
159	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
160	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
162	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
163	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
164	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
165	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
166	045	032	159037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
168	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
169	136	032	199035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
170	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
172	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
174	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
175	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
176	009	032	329011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
178	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

179	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
180	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
181	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
182	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
183	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
184	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
186	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
187	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
188	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
189	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
190	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
192	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
193	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
194	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
195	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
196	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
198	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
199	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
200	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
201	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
202	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
204	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
205	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
206	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
207	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
208	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
210	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
211	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
212	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
213	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
214	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
216	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
217	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
218	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
219	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
220	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
222	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
223	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
224	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
225	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
226	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
228	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
229	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
230	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
231	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
232	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
234	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
235	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
236	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
237	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
238	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
240	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
241	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
242	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
243	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	82.87	96.65	100.00	100.00	84.74	61.35	85.57	100%	0.00	85.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.33	10.00	10.00	8.47	15.34				
					Nilai Aspek	91.44		95.35				61.35				
244	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.99	95.41	0.00	0.00	100.00	72.00	68.33	80%	0.00	85.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.25	19.08	0.00	0.00	10.00	18.00				
					Nilai Aspek	87.50		97.71				72.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.96	99.39	0.00	0.00	0.00	80.09	42.32	50%	0.00	84.63
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02				
					Nilai Aspek	90.98		99.39				80.09				
246	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	67.73	63.17	0.00	0.00	93.18	100.00	67.11	80%	0.00	83.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.16	12.63	0.00	0.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	83.87		78.17				100.00				
247	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				
248	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
249	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
250	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
252	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.82	57.45	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.49	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.41		57.45				100.00				
253	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
254	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
255	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
256	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
258	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
259	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
260	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
261	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
262	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
264	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
265	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
266	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
267	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
268	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
270	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
271	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
272	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
273	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
274	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
276	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
277	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
278	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
279	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
280	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
282	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
283	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
284	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
285	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
286	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
288	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
289	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
290	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
291	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
292	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

293	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
294	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
295	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
296	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
297	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
298	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
300	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
301	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
302	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
303	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
304	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
306	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
307	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
308	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
309	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
310	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	068	032	690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
312	068	032	690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
313	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
314	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
315	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
316	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
318	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
319	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
320	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
321	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
322	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
324	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
325	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
326	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
327	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
328	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
330	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
331	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
332	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
333	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
334	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
336	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
337	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
338	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
339	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
340	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
342	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
343	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
344	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47.68	49.72	70%	0.00	71.03
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.80	20.00	0.00	0.00	0.00	11.92				
					Nilai Aspek	76.00		100.00				47.68				
345	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	53.02	100.00	0.00	0.00	0.00	37.61	47.36	70%	0.00	67.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.95	20.00	0.00	0.00	0.00	9.40				
					Nilai Aspek	76.51		100.00				37.61				
346	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	56.57	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.99	70%	0.00	65.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.49	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	78.29		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	53.12	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.47	70%	0.00	64.95
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.97	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	76.56		100.00				30.00				
348	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	51.94	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.29	70%	0.00	64.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.79	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.97		100.00				30.00				
349	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				30.00				
350	060	032	209033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
351	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
352	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
354	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
355	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
356	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
357	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
358	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
360	050	032	319033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
361	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
362	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
363	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
364	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
366	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
367	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
368	066	032	690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
369	113	032	690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
370	085	032	690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

371	066	032	690966	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
372	113	032	690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
373	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
374	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
375	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
376	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

377	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
378	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
379	085	032	690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
380	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 11 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 669/ITJ.0/RC.610/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 98,04% yaitu sebanyak 150 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 153 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke III Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal PK

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	38	35	98,04	3	8,57	98,04
2	Dit. KE	0	0	0	0	0	100
3	Dit. P3K	14	14	100	100	0	100
4	Dit. Jasbar	0	0	0	0	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100
8	BPSPL Makasar	18	18	100	100	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		153	150	98,04	3	8,57	98,04

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

14 Juli 2025

Yth.

1. Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : 1137/SJ.3/KP.720/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Data Capaian dan Evaluasi Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II/Semester I Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 10 Juli 2025, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025, yaitu sebesar **85,22** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi sebesar 22,39;
 - b. Kompetensi sebesar 31,61;
 - c. Kinerja sebesar 26,23;
 - d. Displin sebesar 4,99.
2. Kinerja Indeks Profesionalitas ASN secara umum tercapai di atas target, hal ini karena adanya penyesuaian penghitungan bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin.
3. Persentase capaian dimensi kompetensi masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi pegawai dan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai karena perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional berdasarkan riwayat sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025
 Tanggal : 14 Juli 2025

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,09	27,44	24,68	5	80,2
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,83	29,34	25	5	82,18
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,39	28,32	25	5	81,71
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,4	28,09	25,85	5	82,34
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,71	29,06	26,29	5	84,06
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23	30,66	26,5	5	85,16
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,58	34,65	27,28	5	88,51
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,7	34,76	24,8	5	86,26
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,25	34,98	27,94	5	90,18
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,84	31,36	26,02	5	84,22
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,83	32,62	25,17	5	84,62
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,3	31,84	26,1	4,92	84,16
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22	36,19	27,62	5	90,82
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,25	30,44	27,55	5	85,53

Keterangan :

Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <https://ipasn.sdmao.id/>

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Miftahul Huda



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 14 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berkenaan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP Nomor: 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, bersama ini disampaikan rincian hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Rekap Pagu Terumumkan (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW2 (Rp)	% RUP Terumumkan
			Triwulan 2				
			RUP Penyedia (Rp)	RUP Swakelola (Rp)	Total (Rp)		
		DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	183.520.669.000	50.284.466.000	233.805.135.000	-	100%
1	622145	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	107.361.299.000	50.284.466.000	157.645.765.000	-	100%
2	499346	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	2.720.603.000	-	2.720.603.000	-	100%
3	477456	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	2.916.231.000	-	2.916.231.000	-	100%
4	477425	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	2.343.328.000	-	2.343.328.000	-	100%
5	477431	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	14.676.457.000	-	14.676.457.000	-	100%
6	477419	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	5.536.826.000	-	5.536.826.000	-	100%
7	499352	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	26.318.377.000	-	26.318.377.000	-	100%
8	290145	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	3.062.287.000	-	3.062.287.000	-	100%
9	477440	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	18.585.261.000	-	18.585.261.000	-	100%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

DAFTAR PEJABAT

1. Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut
2. Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
6. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
7. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
9. Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR

JALAN MAKMUR DAENG SITAKKA NOMOR 129 MAROS 90511

TELEPON (0411) 371337 FAKSIMILI (0411) 371337

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsplmakassar@kkp.go.id

Nomor	: B.345/BPSPL.3/TU.140/IV/2025	10 April 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun Anggaran 2025	

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
di. Gedung Mina Bahari III Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor: B.60/DJPK.1/TU.210/IV/2025 tanggal 10 April 2024 perihal Pelaporan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar periode Triwulan I Tahun 2025 melalui tautan https://bit.ly/SPIP_BPSPLMakassar_2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terimakasih.

Plt, Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar,



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Muhammad Ishak Yusma,



JALAN MAKMUR DG. SITAKKA NO. 129, MAROS SULAWESI SELATAN 90511 - Telp/ Fax. 0411 - 371337
Email: bpsplmakassar@kkp.go.id